

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

2017

PERDA NOMOR 01 TAHUN 2017 16 HALAMAN

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 12 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 2002, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 2004, PP 26 Tahun 2008, Permendagri No. 1 Tahun 2007, Permen PU No. 1/PRT/M/2014, Perda No. 04 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Asas dan Tujuan
 2. Fungsi dan Jenis RTH
 3. Perencanaan

4. Pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian
5. Peran Serta Masyarakat
6. Sanksi Administrasi
7. Ketentuan Penyidikan
8. Ketentuan Pidana
9. Ketentuan Peralihan

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2017

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2017

PERDA NOMOR 02 TAHUN 2017 14 HALAMAN

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRAK : - Bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat sosial dan multidimensi dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Timur yang sejahtera untuk seluruh lapisan masyarakat persoalan kemiskinan harus di tanggulangi dengan program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 12 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2012, Perpres No. 166 Tahun 2014, Permendagri No. 42 Tahun 2010, Perda No. 10 Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Hak dan Kewajiban
 2. Kelembagaan
 3. Kriteria, Pendataan dan Data
 4. Kebijakan, Strategi dan Program
 5. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 6. Peran Serta Masyarakat
 7. Pengaduan
 8. Monitoring dan Evaluasi
 9. Pembiayaan

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2017

KESEHATAN IBU BAYI BARU LAHIR DAN ANAK
2017

PERDA NOMOR 03 TAHUN 2017 14 HALAMAN

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang Kesehatan
Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak

ABSTRAK : - Bahwa upaya kesehatan ibu dan anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk
- menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

UU No. 12 Tahun 1999, UU No.36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 18
- Tahun 2012, PP No. 33 Tahun 2012, Permenkes No. 3 Tahun 2014, Permekes No. 53 Tahun 2014, Permenkes No. 97 Tahun 2014, Permenkes No. 43 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;
2. Hak dan Kewajiban;
3. Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak;
4. Penyelenggaraan;
5. Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Larangan;

- CATATAN : -
7. Sanksi;
 8. Pembiayaan;
 9. Peran Serta Masyarakat dan Swasta;
 10. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2017

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2017

PERDA NOMOR 04 TAHUN 2017 14 HALAMAN

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

-

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 12 Tahun 1999,
UU No.28 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014,
UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 40 Tahun
1996, PP No. 2 Tahun 2001, PP No. 27 Tahun
2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006,
Permenkeu No. 78/PMK.06/2014, Permendagri
No. 19 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Asas, Maksud dan Tujuan;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Wewenang, Tugas dan Fungsi;
 4. Perencanaan dan Pengadaan;
 5. Penggunaan;
 6. Pemanfaatan;
 7. Pengamanan dan Pemeliharaan;
 8. Penilaian;
 9. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran;
 10. Pemusnahan;
 11. Penghapusan;
 12. Pemindahtanganan;
 13. Penatausahaan
 14. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
 15. Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Layanan Umum;
 16. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara;
 17. Pembiayaan;
 18. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2017

PENATAAN DESA

2017

PERDA NOMOR 05 TAHUN 2017 14 HALAMAN

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang Penataan
Desa

ABSTRAK : - Bahwa desa memiliki hak asal usul dan kewenangan local berskala desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan desa dan masyarakat desa. Bahwa pembentukan, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Lampung Timur perlu diatur agar mempunyai pedoman yang pasti

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2014,
UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun
2014, PP No. 47 Tahun 2015, Permendagri
No. 81 Tahun 2015, Permendes No. 1 Tahun
2015, Permendes No. 2 Tahun 2015,
Permendagri No. 113 Tahun 2016,
Permendagri No.1 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Tujuan dan Ruang Lingkup;
 2. Pembentukan Desa;
 3. Penggabungan Desa;
 4. Penghapusan Desa;
 5. Perubahan Status Desa;

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2017

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2017

PERDA NOMOR 05 TAHUN 2017 55 HALAMAN

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK : - Bahwa pendidikan merupakan hak masyarakat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas

sumber daya manusia, daya saing global dalam upaya mencerdaskan bangsa, sehingga perlu diselenggarakan dengan baik dan menjamin diperolehnya kesempatan

- pendidikan yang bermutu secara merata bagi seluruh peserta didik.

Pendidikan merupakan suatu system yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidikan dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi dan partisipasi masyarakat maka dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,

- peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19

- Tahun 2005, PP No. 32 Tahun 2013, PP No.

55 Tahun 2005, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 74 Tahun 2008, Permenpenas No. 39 Tahun 2009, PP No.17 Tahun 2010, Permenpenas No 22 Tahun 2006, Permenpenas No. 23 Tahun 2006, Permenpenas No. 24 Tahun 2006, Permenpenas No. 12 Tahun 2007, Permen P&K No. 75 Tahun 2016

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Fungsi dan Tujuan;
2. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Hak dan Kewajiban;
4. Jalur, Jenis dan Jenjang Pendidikan;
5. Pengelolaan Pendidikan;
6. Kurikulum;
7. Pendidikan Lintas Satuan dan Jalur Pendidikan
8. Bahasa Pengantar;
9. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
10. Prasarana dan Sarana;
11. Evaluasi, Akreditasi dan Sertifikasi;

CATATAN : - 12. Pendanaan;

13. Pembukaan, Penambahan, Penggabungan,
dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
14. Penjaminan Mutu;
15. Peran Serta Masyarakat;
16. Kerjasama;
17. Pengawasan dan Pengendalian;
18. Sanksi Administratif;
19. Ketentuan Penyidikan;
20. Ketentuan Pidana.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan 29 Mei 2017

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2017

PERDA NOMOR 07 TAHUN 2017 25 HALAMAN

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah, diperlukan peranan pemerintah daerah dalam mendorong dan member perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar

- mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di daerah.

Upaya pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan

- masyarakat dalam mendorong dan member perlindungan serta peluang usaha yang kondusif.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 47 Tahun 2015, Permendagri No. 81 Tahun 2015, Permendes No. 1 Tahun 2015, Permendes No. 2 Tahun 2015, Permendagri No. 113 Tahun 2016, Permendagri No.1 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Azas, Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan;
2. Pelaksanaan Pemberdayaan;
3. Perlindungan dan Penumbuhan Iklim Usaha;
4. Pengembangan Usaha;
5. Kemitraan Jaringan Usaha;
6. Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
7. Pembinaan dan Pengawasan;
8. Sanksi Administrasi;
9. Ketentuan Pidana.

CATATAN

: -

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2017

PERUBAHAN PERDA PILKADES

2017

PERDA NOMOR 08 TAHUN 2017 14 HALAMAN

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan legalitas pelaksanaan pemilihan kepala desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu
- disempurnakan

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 47 Tahun - 2015, Permendagri No. 112 Tahun 2014, Permendagri No.82 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Daerah ini yang diubah yaitu :

1. Pasal 1 angka 2, angka 19, angka 20, angka 27, angka 28, angka 29, angka 31, angka 35 diubah dan ditambahkan satu angka yaitu angka 36.a;
2. Pasal 9;
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9.A;
4. Pasal 10 ayat (7) dihapus;
5. Pasal 21 ayat (1) huruf g dihapus;
6. Pasal 22 diubah;
7. Pasal 25 diubah;
8. Pasal 32 ayat (5) dihapus;
9. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) diubah ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 3.a
10. Pasal 43 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni

CATATAN : - ayat 3.a

11. Pasal 46 ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6) diubah ayat (7),(8) dihapus;
12. Pasal 47 ayat (1),(2) diubah dan ayat (3) dihapus;
13. Pasal 49 ayat (3) dan (4) diubah;
14. Pasal 51 ayat (1) diubah dan ayat (2), ayat (3) dihapus.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

3 Agustus 2017

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD

2017

PERDA NOMOR 09 TAHUN 2017 14 HALAMAN

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamung Timur

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 18 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD;
3. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

4. Ketentuan lain-lain.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
3 Agustus 2017

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA. 2016
2017

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2017 48 HALAMAN

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 bahwa
kepala daerah menyampaikan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 11 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
 2. Neraca;
 3. Laporan Operasional;
 4. Laporan Perubahan Ekuitas;
 5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 6. Laporan Arus Kas;
 7. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- CATATAN : -

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan

29 Agustus 2017

PERUBAHAN APBD TA. 2017

2017

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2017 48 HALAMAN

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2017, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28

- Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 11 Tahun 2017.

CATATAN : - Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 2.074.518.000,00 bertambah sejumlah Rp. 92.640.233.105,74 sehingga menjadi Rp. 2.166.640.751.105,74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
29 Agustus 2017

